



ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
06-Desember-2024	11- Desember- 2024	20- Desember- 2024	30- Desember- 2024
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3180">https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3180</a>			

### **Peran Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia**

Moh. Khoirul Fatih

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-Mail: Khoirulfatih12@gmail.com

**ABSTRAK:** Pluralisme agama dan pluralitas merupakan fakta sosial yang tidak terbatahkan, Indonesia adalah Negara yang terdiri suku, agama, dan ras. Selain itu, konflik sosial yang mengatasnamakan agama juga tidak pernah selesai sampai sekarang, hal demikian disebabkan karena banyak umat beragama Indonesia yang cenderung mengedepankan paham eksklusif dan radikalisme sehingga berkarakter keras dan kaku. Lembaga pendidikan dalam hal ini pondok pesantren memiliki peran penting dalam meminimalisir konflik keagamaan yang terus terjadi di Indonesia, salah satunya adalah menanamkan paham moderasi beragama yang kuat, sehingga akan lahir para alumni pesantren yang nantinya dapat menjadi agen perdamaian bagi Indonesia dan dunia. Berdasarkan fungsinya sebagai pendidikan agama Islam, pesantren menjadi tempat penting penyebaran nilai nilai keagamaan baik inklusif maupun eksklusif. Akan tetapi, pesantren diharapkan peranannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dapat melahirkan santri yang moderat, toleran. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan agama yang berorientasi pada nilai nilai moderasi beragama.

Kata Kunci : Pluralisme, Pesantren, Moderasi Beragama

**ABSTRACT:** Religious pluralism and diversity are undeniable social facts. Indonesia is a country composed of various ethnicities, religions, and races. Furthermore, social conflicts in the name of religion have persisted to this day. This issue arises because many religious followers in Indonesia tend to prioritize exclusive and radical ideologies, resulting in rigid and harsh characters. Educational institutions, particularly Islamic boarding schools (pesantren), play a crucial role in mitigating these religious conflicts in Indonesia. One of their



significant roles is instilling strong religious moderation, thereby producing pesantren alumni who can become peace agents for Indonesia and the world. Given its function as an Islamic educational institution, pesantren is a vital place for spreading both inclusive and exclusive religious values. However, pesantren are expected to function as Islamic educational institutions that can produce moderate and tolerant students. This goal can be achieved through religious education focused on the values of religious moderation.

Keywords: Pluralism, Pesantren, Religious Moderation.

## PENDAHULUAN

Setiap agama terkandung dua macam kecenderungan ajaran, yang tampak saling bertentangan. *Pertama*, kecenderungan yang mengajarkan bahwa agama yang dianut oleh seseorang adalah agama yang paling benar, mutlak, superior, dan menyelamatkan. Sedangkan orang-orang yang beragama lain adalah sesat, kafir, celaka, dan harus dijauhi atau dibujuk agar mengikuti agamanya. *Kedua*, ajaran bahwa setiap orang harus menghormati, dicintai, tidak ada paksaan dalam agama, dan dianjurkan berbuat kebajikan kepada siapa saja, bahkan kebaikan ini dianggap sebagai inti dari ajaran setiap agama.<sup>1</sup> Sejarah mencatat bahwa berbagai peristiwa ketegangan antarumat beragama telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan agama dan umatnya, khususnya di Indonesia.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multi *religi* dan multi *kultur* yang terdiri dari berbagai macam agama, kepercayaan, suku, ras, budaya serta golongan. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan semangat toleransi, penuh kedamaian serta mengakui pluralisme keberagaman dan keesaan dalam kebenaran sebagai bentuk *tantularisme*.<sup>2</sup> Tradisi *tantularisme* menjadi akar historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluang lainnya bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama adalah Pancasila sebagai titik temu peradaban Indonesia serta beragamnya budaya (*culture*) dan kearifan lokal sebagai penyangga budaya kerukunan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: Mataram Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Semangat *tantularisme* adalah semangat keagamaan yang memiliki tipologi religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik. Semangat ini dianggap masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang terbilang *plural*. Lihat I Wayan Suja, *Titik Temu Iptek dan Agama Hindu: Tafsir Ilmiah Ajaran Weda*, (Jakarta: Manikgeni, 2000), 35. Baca juga I Wayan Suja, *Perkembangan Agama Hindu di Indonesia*, dalam Wiwin Siti Aminah dkk (ed), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2003), hlm.17.

<sup>3</sup> A. Singgih Basuki, *Teologi Kerukunan Agama: Menguak Kembali Butiran Gagasan A. Mukti Ali*, Makalah, disampaikan pada konferensi Internasional Studi Agama tanggal 28-29 Oktober 2015, yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbandingan Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1.



Konflik dan kekerasan bernuansa agama menunjukkan gejala yang terus meningkat belakangan ini. Tentu banyak faktor yang menyulut terjadinya banyak kasus semacam itu. Namun ada benang merah yang dapat ditarik dari gejala tersebut, yakni bahwa toleransi sebagai prinsip dasar kehidupan bersama di tengah beragama perbedaan, semakin ditinggalkan dan diganti oleh kecenderungan main hakim sendiri, gampang marah, sensitif terhadap kehadiran pihak lain, curiga terhadap segala sesuatu yang datang dari luar, dan mudah terpancing dalam konflik.

Kecenderungan ini tentu memprihatinkan. Disadari atau tidak, kecenderungan seperti itu akan mengancam masa depan kemanusiaan. Itulah sebabnya, perlu ada usaha-usaha serius untuk meminimalisir kecenderungan tersebut. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah melatih tokoh-tokoh kunci di masyarakat agar lebih apresiatif terhadap keragaman, sensitif terhadap kepentingan bersama, tanggap terhadap potensi dan ancaman konflik, dan memiliki perhatian untuk bisa diajak membangun resolusi konflik dan *peace bulding*.<sup>4</sup> Agama menempati ruang antara perbedaan bawaan dan perolehan, yaitu agama dapat diwariskan oleh generasi penerus dari generasi sebelumnya, atau dapat pula dikembangkan melalui keyakinan pribadi. Fakta menyatakan bahwa keyakinan agama paling banyak diwariskan secara kolektif daripada dikembangkan secara individu menjadikan penerimaan terhadap agama menjadi sesuatu yang penting bagi kesejahteraan dan kerukunan umat manusia.<sup>5</sup>

Selain mengeksplorasi ajaran-ajaran universal dari masing-masing agama, banyak pihak meyakini bahwa filsafat *perennialism* dapat dijadikan bingkai filosofis dalam mewujudkan harmoni antar-pemeluk keyakinan yang berbeda beda dalam masyarakat. Filsafat ini menekankan pada kesatuan sumber kebenaran agama-agama yang secara partikular berbeda-beda. Pendekatan yang ditempuh, dengan demikian adalah mendekatkan berbagai keyakinan agama melalui persamaan-persamaan yang dimiliki oleh masing-masing. Dengan kata lain, sisi universal agama lebih dikedepankan daripada sisi partikularnya.<sup>6</sup>

Problem internal yang mendera umat Islam saat ini yakni adanya gerakan gerakan keagamaan eksklusif yang sesama muslim disebut "pihak lain" karena perbedaan pandangan. Bahkan gerakan eksklusif tersebut diukuti dengan mengklaim kelompok muslim sebagai "kafir". Selain itu, problem lain yang dihadapi oleh umat Islam adalah adanya kelompok muslim yang melakukan aksi

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Modul Pengembangan Wadah Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2016), hlm. 3.

<sup>5</sup> Mustofa, *Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Press, 1997), hlm. 21.

<sup>6</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: PT. Grasindo Utama, 2001), hlm. 34.



kekerasan dengan mengatasnamakan agama, *violence the name of God/Religions*, agama seolah olah dijadikan surat rekomendasi untuk melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok lain, padahal Al Qur'an telah menjelaskan bahwa Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagai rahmat bagi seluruh alama *rahmatal lil alamin*. Aksi pengeboman seperti Bom Bali, Kedutaan Australia, JW. Marriot, dan Ritsz Carlton, yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, telah mengorbankan banyak jiwa dan harta benda. Peristiwa ini diindikasikan oleh banyak pihak akibat adanya radikalisme agama, khususnya Islam.

Radikalisme Islam<sup>7</sup> yang melatarbelakangi gerakan terorisme merupakan salah satu masalah yang kini dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia<sup>8</sup> Tindakan radikalisme sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan politik ikut andil dalam memengaruhi radikalisme Islam. Namun demikian, radikalisme Islam sering kali digerakan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan tertekan, terhegemoni, tidak aman secara psikososial, serta ketidakadilan lokal dan global<sup>9</sup> Komunitas Muslim berada dalam suasana perang menghadapi kekuatan masyarakat modern yang sekuler<sup>10</sup> Gerakan ini juga dilihat sebagai sebuah reaksi langsung terhadap pertumbuhan negara-bangsa serta permasalahan-permasalahan pelik abad ini. Pengikut gerakan ini terdiri atas penduduk desa yang bermigrasi ke kota atau masyarakat yang berstrata sosial rendah. Gerakan ini memperoleh banyak pengikut di kalangan generasi muda Islam yang tumbuh di bawah system pemerintahan nasionalis-sekuler<sup>11</sup>.

Salah satu faktor yang ikut mempersubur pemahaman dan aksi radikalisme di Indonesia adalah pendidikan. Akbar S. Ahmed berkesimpulan bahwa pendidikan Islam menghadapi sebuah masalah. Pendidikan Islam terlalu sempit dan mendorong tumbuhnya chauvinisme keagamaan<sup>12</sup> Salah satu bentuk

<sup>7</sup> Banyak istilah lain yang juga sering digunakan untuk menunjuk radikalisme, seperti fundamentalisme, revivalisme, ekstremisme, militanisme, garis keras, dll. Lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 13- 16. Lihat pula Roxanne L. Euben, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 41; Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 241.

<sup>8</sup> Wawan H. Purwanto, *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-aakarnya, Mungkinkah?* (Jakarta: CMB Press, 2007), hlm. 15.

<sup>9</sup> M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 30

<sup>10</sup> Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, (Yogyakarta: Terawang Press, 2003), hlm. 16.

<sup>11</sup> Youssef M. Choueiri, *Islam Garis Keras: Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme* (Yogyakarta: Prisma Media Qonun, 2003), hlm. vii

<sup>12</sup> Akbar S. Ahmed menyayangkan belum adanya penelitian tentang faktor sosial dan politik yang memengaruhi kemunculan madrasah atau sekolah-sekolah agama yang mendidik Taliban. Akbar S. Ahmed, *Islam sebagai*



pendidikan keagamaan di Indonesia yang mendapat sorotan tajam setelah terjadinya beberapa aksi radikal mengatasnamakan agama adalah pesantren<sup>13</sup>. Sejak terungkapnya para pelaku aksi pengeboman Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren al-Islam di Lamongan, radikalisme sering kali dikaitkan dengan pendidikan keagamaan di pesantren. Tampaknya ada keterkaitan antara pendidikan keagamaan di pesantren dan radikalisme. Fenomena radikalisme pesantren sesungguhnya sesuatu yang aneh dan baru belakangan ini terjadi. Pesantren sebagai institusi keagamaan sebenarnya tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme. Pesantren bertugas untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas (tafaqquh fi al-din)<sup>14</sup> Karena itu, pesantren mengajarkan semua hal yang ada di dalam agama, dari tauhid, syariat, hingga akhlak.

Pesantren adalah embrio pendidikan Islam yang telah lama mengakar di Nusantara. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam khas di Indonesia yang memiliki reputasi global dalam mencetak manusia yang memiliki keseimbangan otak dan hati. Pesantren sebagai salah satu aset bangsa perlu dimaksimalkan perannya terutama dalam pembentukan watak moderasi yang menjadi penentu keberlanjutan sistem kerukunan etnis dan agama di Indonesia. Kehadiran pesantren dikatakan unik karena dua alasan yakni *pertama*, pesantren hadir untuk merespon terhadap situasi dan kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral atau bisa disebut perubahan sosial. *Kedua*, didirikannya pesantren adalah untuk menyebarluaskan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara.

Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa. Sejak masa awal penyebaran Islam, pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia. perkembangan dan kemajuan

---

Tertuduh, (Bandung: Arasy Mizan, 2004), hlm. 244

<sup>13</sup> Hal ini tentu saja membenarkan polarisasi yang pernah dibuat oleh Martin Van Bruinessen bahwa pesantren sebagai institusi keagamaan yang memiliki "tradisi agung" (great tradition) untuk mentransmisikan Islam di

Indonesia mengalami polarisasi ke dalam pola tradisional, modernis, reformis, dan fundamentalis mengikuti aliran-aliran Islam yang berkembang. Karena itu, pesantren sudah bukan lagi menjadi karakter khas kelompok tradisional yang selama ini memiliki jaringan pesantren yang terbesar di wilayah Nusantara. Kini pesantren sudah dimiliki oleh setiap aliran keagamaan (Islam) di Indonesia, baik yang tradisional, modernis, bahkan radikal. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995).

<sup>14</sup> Menurut konsep ini, hanya ulama-ulama besar yang mempunyai otoritas untuk menginterpretasi dua sumber pokok Islam. Inheren dalam pernyataan ini adalah pernyataan lain yang mengatakan hanya komunitas Muslim saja yang dibebani dengan tugas-tugas pokok untuk memimpin masyarakat umum (the society at large). Dengan kata lain, pondok pesantren merupakan model utama bagi pencarian pengetahuan masyarakat Muslim. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 16.



masyarakat Islam Nusantara, khususnya di Jawa yang tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren.

Pesantren sejak awal berdirinya hingga sekarang menjadi salah satu pusat studi Islam yang paling dipercaya umat Islam. Kegiatan pendidikan keagamaan di Pesantren dinilai komprehensif karena tidak hanya terjadi *transfer of knowledge*, akan tetapi *transfer of value*; tidak hanya mendasarkan pada pemahaman teori, akan tetapi praktik ibadah sekaligus; tidak hanya mengandalkan hafalan serangkaian teori keilmuan akan tetapi membiasakan diri dalam tradisi ritual; tidak hanya secara retorik menggalakkan konsep, *tawassuth*, dan *tawazun*, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tataran praksis kehidupan pesantren. Bisa dikatakan bahwa pesantren merupakan miniatur masyarakat Islam ideal yang jika pengaruhnya sampai pada spektrum yang lebih luas tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sesuai dengan kehidupan pesantren itu sendiri. Masyarakat di sekitar pesantren cenderung mengikuti pola kehidupan pesantren. Sebaran alumni pesantren di berbagai belahan nusantara cenderung berperilaku sesuai dengan tradisi pesantren di mana dulu ia menimba ilmu, dan ia akan berusaha menerapkan tradisi keilmuan dan ibadah, tata nilai dalam masyarakat di mana ia tinggal.

Dinamika kehidupan pesantren pada umumnya secara tidak langsung menjadi subkultur pertumbuhan, perkembangan dan dinamika yang secara luas terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pesantren tidak dapat menghindari dari segala bentuk perubahan, perbedaan bahkan pertentangan individu maupun kelompok yang terjadi dan menjadi bagian dari pesantren ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat atau pihak luar. Pesantren dituntut untuk dapat menghadapi serta beradaptasi dengan situasi keragaman, perbedaan dan perkembangan tersebut. Belakangan ini, seringkali banyak ditemukan munculnya situasi perbedaan dan perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah seringkali terjadi kekerasan, kerusakan hingga bahkan kasus pertikaian antar masyarakat dan yang lebih mengesankan lagi kejadian tersebut hanya seringkali dilatar belakangi ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka serta kesalah pahaman antara dua belah pihak dan ada pula yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik semata.

Pondok pesantren menjadi sumber utama modal sosial di samping keluarga atau masyarakat, yang mana santri dididik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik atau agar dapat hidup bermasyarakat yang dengan ilmunya dapat bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, dan kerjasama yang dilandaskan pada nilai-nilai utama yang dikembangkan tersebut merupakan modal sosial pendidikan pesantren. Modal sosial yang dimiliki dapat berfungsi sebagai perekat melalui keterlibatan individu atau kelompok dalam institusi pendidikan.



Modal sosial di atas menjadi salah satu faktor utama pesantren dapat dijadikan sebagai sarana membentuk generasi muda yang moderat untuk kemajuan bangsa dan kemandirian ekonomi. Sejarah panjang pesantren sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia, didukung dengan jumlah santri yang luar biasa banyak dan kepercayaan masyarakat yang saling menguatkan dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan kesadaran bersama membangun Indonesia dan generasi kompeten yang cinta tanah air.

Moderatisme (*wasatiyyah*), merupakan sebuah metode dalam berfikir dan berperilaku yang didasari dengan sikap baik, adil, dan tawāzun (seimbang) dalam menyikapi banyak hal, sehingga ditemukan kondisi yang tentram, dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Wujud yang paling tampak dari sikap moderatisme dalam kaitannya dengan pluralitas masyarakat adalah sikap toleran. Dalam kaitannya dengan keyakinan agama, sikap toleransi ini akan terwujud jika masyarakat muslim belajar menghargai keyakinan-keyakinan lain yang mereka anggap berbeda. Toleransi ini dilakukan tidak dengan menghilangkan ketidaksepakatan, melainkan dengan belajar dewasa dalam menerima ketidaksepakatan tersebut. Yang diperlukan bukan sistem yang menghapus perbedaan, melainkan sebuah sistem yang mampu menghargai perbedaan dalam batas-batas yang rasional, sehingga terwujud ketentraman yang sangat didambakan setiap manusia.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan mempraktekkan paham moderatisme, sejak awal masuknya Islam ke Indonesia melalui para dai dari Arab dan Gujarat, khususnya wali songo. Namun beberapa tahun ini, perilaku moderatis tersebut terlukai oleh tangan beberapa kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama. Mereka mengaku bahwa perilaku tersebut memang yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Ironisnya, orang-orang yang tadinya moderat, beberapa di antara mereka justru beralih menjadi radikal, karena terpengaruh ajakan para missionaris garis keras. Mudah-mudahan mereka mengikuti pengaruh tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap dasar-dasar ajaran Islam, terutama dalam hal ini adalah karena al-Qur'an tidak dipahami secara komprehensif. Pemahaman yang tidak utuh akan memberikan kesalahpahaman terhadap isi dan pesan universal yang dikandung.

Pesantren memiliki modal besar di tengah upaya pemerintah mewujudkan moderasi beragama, *pertama* jumlah santri yang banyak dapat menjadi modal dalam rangka menyampaikan pentingnya pemahaman moderasi kepada orang banyak, *kedua* peran pondok pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan Islam juga sebagai penghubung masyarakat sekitar, sehingga dapat memudahkan melakukan syiar Islam yang santun dan moderat. *ketiga* peran pesantren dalam menerapkan kurikulum pembelajaran agama Islam yang lebih moderat. Ketiga potensi tersebut jika dioptimalkan dapat menjadi sarana alternatif mewujudkan moderasi beragama di Indonesia



Dengan demikian, lahir dan adanya pesantren seharusnya menjadi wadah utama dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam menanggulangi situasi seperti itu. Disinilah peran pesantren menjadi benteng agama, budaya dan sosial dipertaruhkan. Bahkan pesantren diharapkan sebagai institusi yang memiliki basis kekuatan “*Indegeanous cultural*” atau bentuk kebudayaan asli dari kekayaan agama dan budaya. Menghadapi era revolusi industri 4.0, tantangan yang akan terus dihadapi pesantren adalah bermetamorfosis menjadi lembaga yang memiliki fungsi transformasi kultural baik dari dunia realitas maupun dunia maya. Selain itu, pesantren juga diharapkan melakukan transformasi pendidikan yang meliputi tiga aspek yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lahirnya Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya adalah agar parasantri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Usaha Syaikh menemukan momuntem seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit (1293 - 1478 M). Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar negara<sup>15</sup>.

Hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan *muballig* Islam yang datang dari Jazirah Arab seperti Hadramaut, Persia, dan Irak<sup>16</sup>.

Lembaga pendidikan pada awal masuknya Islam belum bernama pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Saridjo sebagai berikut:

<sup>15</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), hlm. 23.

<sup>16</sup> Fatah Syukur, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 248.





“Pada abad ke-7 M. atau abad pertama hijriyah diketahui terdapat komunitas muslim di Indonesia (Peureulak), namun belum mengenal lembaga pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan yang ada pada masa-masa awal itu adalah masjid atau yang lebih dikenal dengan nama *meunasah* di Aceh, tempat masyarakat muslim belajar agama. Lembaga pesantren seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Jawa”<sup>17</sup>

Usaha dakwah yang lebih berhasil di Jawa terjadi pada abad ke-14 M yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dari tanah Arab. Menurut sejarah, Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan Zainal Abidin (cicit Nabi Muhammad saw). Ia mendarat di pantai Jawa Timur bersama beberapa orang kawannya dan menetap di kota Gresik. Sehingga pada abad ke-15 telah terdapat banyak orang Islam di daerah itu yang terdiri dari orang-orang asing, terutama dari Arab dan India. Di Gresik, Maulana Malik Ibrahim tinggal menetap dan menyiarkan agama Islam sampai akhir hayatnya tahun 1419 M. Sebelum meninggal dunia, Maulana Malik Ibrahim (1406-1419) berhasil mengkader para muballig dan di antara mereka kemudian dikenal juga dengan wali. Para wali inilah yang meneruskan penyiaran dan pendidikan Islam melalui pesantren. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai perintis lahirnya pesantren di tanah air yang kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel<sup>18</sup>.

Mengenai sejarah berdirinya pesantren pertama atau tertua di Indonesia terdapat perbedaan pendapat di kalangan peneliti, baik nama pesantren maupun tahun berdirinya. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Departemen Agama pada 1984-1985 diperoleh informasi bahwa pesantren tertua di Indonesia adalah Pesantren Jan Tanpes I di Pamekasan Madura yang didirikan pada tahun 1762. Tetapi data Departemen Agama ini ditolak oleh Mastuhu. Sedangkan menurut Martin van Bruinessen seperti dikutip Abdullah Aly bahwa Pesantren Tegalsari, salah satu desa di Ponorogo, Jawa Timur merupakan pesantren tertua di Indonesia yang didirikan tahun 1742 M. Perbedaan pendapat tersebut karena minimnya catatan sejarah pesantren yang menjelaskan tentang keberadaan pesantren.

Pondok Pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari *pondok* dan *pesantren*. Kata *pondok* (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata *pondok* berasal dari bahasa arab “*fundūk*” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya *pondok* memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata *pesantren* berasal dari kata dasar “*santri*” yang

<sup>17</sup> Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010), hlm. 17-30.

<sup>18</sup> Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, hln. 35



dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dari segi etimologi pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama.

Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwoinya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pesantren sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal<sup>20</sup>.

Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Mengenai asal-usul dan latar belakang pesantren di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. *Pertama*, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pandangan ini dikaitkan dengan fakta bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat dengan dipimpin oleh kyai. Salah satu kegiatan tarekat adalah mengadakan *suluk*, melakukan ibadah di masjid di bawah bimbingan kyai. Untuk keperluan tersebut, kyai menyediakan ruang-ruang khusus untuk menampung para santri sebelah kiri dan kanan masjid. Para pengikut tarekat selain diajarkan amalan-amalan tarekat mereka juga diajarkan kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Aktivitas mereka itu kemudian dinamakan pengajian. Perkembangan selanjutnya, lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pesantren. Bahkan

<sup>19</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai* (Cet. VII; Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 21.

<sup>20</sup>Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren* (Cet. I; Yogyakarta: KIS, 2001), hlm. 17.



dari segi penamaan istilah pengajian merupakan istilah baku yang digunakan pesantren, baik *salaf* maupun *khalaf*<sup>21</sup>.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan “kuttab”, yakni lembaga pendidikan pada masa kerajaan bani Umayyah yang semula hanya merupakan wahana atau lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah. Pada tahap berikutnya lembaga ini mengalami perkembangan pesat, karena didukung oleh iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak didik.<sup>19</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang menyatakan pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah, yaitu al-Azhar di Kairo, Mesir.

Pendapat ketiga, pesantren yang ada sekarang merupakan pengambil-alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada masa sebelum Islam. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu serta tempat membina kader-kader penyebar agama tersebut. Pesantren merupakan kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Pesantren merupakan sekumpulan komunitas independen yang pada awalnya mengisolasi diri di sebuah tempat yang jauh dari pusat perkotaan (pegunungan)<sup>22</sup>.

Munculnya beberapa pendapat tersebut disebabkan karena tidak tersedianya sumber tertulis yang dapat meyakinkan semua pihak. Namun, dari ketiga pendapat tersebut, sebenarnya mempunyai sisi kebenaran yang dapat dipertemukan. Pendapat yang mengatakan bahwa pesantren berasal dari tradisi Hindu, ada benarnya jika memang diterima bahwa nama itu berasal dari India atau berasal dari bahasa Sansekerta. Pendapat yang mengatakan bahwa pesantren tumbuh dari tradisi sufi juga dapat diterima, jika dilihat fakta sejarah bahwa tradisi pesantren mempunyai kesamaan dengan praktek hidup yang dijalani oleh kaum sufi. Pendapat yang mengatakan bahwa pesantren diadopsi dari tradisi pendidikan di Timur Tengah, karena memang orang yang mula-mula mengembangkan pesantren adalah mereka yang menimba ilmu di Timur Tengah terutama di Mekah dan di Mesir.

<sup>21</sup> Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Islam IV* (Cet. II; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 103. Pendapat ini juga didukung oleh Zamakhsyari yang berpendapat bahwa pesantren, khususnya di Jawa, merupakan kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarekat, bukan antara Islam dengan Hindu. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, hlm. 25

<sup>22</sup> Zamakhsyari Dhofier, 10 dan Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 5.



Terlepas dari itu, bahwa pesantren yang dikenal masyarakat saat ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta sebagai pusat pengembangan Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, pesantren saat ini terus berbenah diri dengan melakukan berbagai pola dan inovasi pendidikan guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

## 2. Potret Perkembangan Pesantren di Indonesia

Pada awal berkembangnya, ada dua fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Fungsi utama itu masih melekat pada pesantren, walaupun pada perkembangan selanjutnya pesantren mengalami perubahan.

Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. Sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspons positif oleh masyarakat. Respon positif masyarakat tersebut dijelaskan oleh Zuhairini sebagai berikut:

Pesantren didirikan oleh seorang kyai dengan bantuan masyarakat dengan cara memperluas bangunan di sekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat pengajaran dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tidak perlubolak-balik pulang ke rumah orang tua mereka. Anak-anak menetap tinggal bersama kyai di tempat tersebut<sup>23</sup>

Perkembangan pesantren terhambat ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pesantren bersikap non-kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari Barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda, pesantren sangat antipati terhadap westernisasi dan modernisme yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah kolonial mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Pemerintah Belanda mencurigai institusi pendidikan dan keagamaan pribumi yang digunakan untuk melatih para pejuang militan untuk melawan penjajah<sup>24</sup>. Dalam masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam yang berpusat pada pesantren, surau, *dayah*, dan lembaga pendidikan Islam lainnya sengaja melakukan *uzlah* dari kekuasaan kolonial<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Zuhairini, et al., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 212.

<sup>24</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 89.

<sup>25</sup> *Uzlah* lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren merupakan bentuk perlawanan secara tersembunyi (*silent opposition*) terhadap kolonialisme Belanda. Lihat: Jajat Burhanuddin (peny.), *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 2.



Pada tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan *Priesterreden* (Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren. Setelah itu, dikeluarkan Ordonansi tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru agama yang mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah. Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang membatasi orang yang boleh memberikan pelajaran mengaji. Akhirnya, pada tahun 1932 peraturan dikeluarkan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah<sup>26</sup>. Peraturan-peraturan tersebut membuktikan ketidak-adilan kebijaksanaan pemerintah penjajahan Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Akan tetapi, pesantren tetap bertahan dan berkembang karena pengelolanya mampu mengatur strategi dengan baik. Berdasarkan laporan pemerintah pemerintah kolonial Belanda, tahun 1831 di Jawa terdapat lembaga pengajian dan pesantren sebanyak 1.853 buah dengan jumlah santri sebanyak 16.500 orang. Pada tahun 1885 pesantren berkembang menjadi 14.929 buah dengan jumlah santri 222.663 orang<sup>27</sup>. Pada tahun 1942 menurut survei yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (*Shumumbu*) yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa mencatat jumlah madrasah, pesantren dan santrinya berjumlah 139.415 orang.

Setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan pesantren yang semula hanya *based institution* kemudian berkembang menjadi pendidikan yang maju. Bahkan kini pesantren bukan hanya milik organisasi tertentu tetapi milik umat Islam Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanun Asrohah sebagai berikut:

Pada waktu Mr. R. Soewandi menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantoro. Panitia ini berhasil menetapkan keputusan yang dalam laporan panitia tanggal 2 Juni 1946, dinyatakan bahwa pengajaran di pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan biaya<sup>28</sup>.

Pada awal tahun 1949, Pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-luasnya dan membuka secara luas jabatan-

<sup>26</sup> Lihat: Zamakhsyari Dhofier, hlm. 41 dan Zuhairini, hlm. 149.

<sup>27</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan* (Cet. I; Jakarta; Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 59-61.

<sup>28</sup> Hanun Asrohah, hlm. hlm. 186.



jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Dampak kebijaksanaan tersebut membuat kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia menurun. Ini berarti bahwa jumlah anak-anak muda yang dulu tertarik kepada pendidikan pesantren menurun dibandingkan dengan anak-anak muda yang ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas<sup>29</sup>.

Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya ketika K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri/swasta. Hal ini semakin mendorong pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren. Pesantren semakin lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebuireng Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP/SMA<sup>30</sup>

Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren lain, bahkan berlomba-lomba mendirikan sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah umum sehingga akses santri dalam melanjutkan pendidikan semakin meluas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini tidak jarang kita temui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK di samping MI, MTs, dan MA. Pada tahun 1978 berdasarkan laporan Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren dan santri berkembang pesat berjumlah 675.364 orang<sup>31</sup>.

Hasil survei Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1978 mengenai keadaan pesantren di Jawa, menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren dipelihara, dikembangkan dan dihargai oleh masyarakat umat Islam di Indonesia. Kekuatan pesantren dapat dilihat dari segi lain, yaitu walaupun setelah Indonesia merdeka telah berkembang jenis pendidikan Islam formal dalam bentuk madrasah<sup>32</sup>.

Antara tahun 1987 sampai dengan tahun 2004 pesantren bertambah

<sup>29</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm 57

<sup>30</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm 60

<sup>31</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm 58.

<sup>32</sup> Hanun Asrohah, hlm. 186.



rata-rata 500 setiap tahunnya. Tahun 2004 sampai 2008 bertambah 1.000 buah pesantren dan dalam waktu 10 tahun terakhir, santrinya bertambah lebih dari dua juta. Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada kebijakan pemerintah yang ada sehingga pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

### 3. Sistem Pendidikan di Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren<sup>33</sup>.

Secara faktual, pesantren dapat dipolakan pada dua tipe atau pola, yaitu berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum.

- a. Tipe pesantren berdasarkan bangunan fisik  
Berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki, pesantren mempunyai lima tipe, yaitu:

Tabel 1  
Tipe bangunan pesantren pada umumnya

Tipe	Keterangan
Tipe I: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai	Pesantren ini masih bersifat sederhana, di mana kyai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk mengajar. Tipe ini santri hanya datang dari daerah pesantren ini sendiri, namun mereka telah mempelajari agama secara kontinyu dan sistematis. Metode pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongan</i> .
Tipe II: ❖ Masjid ❖ Rumah Kyai ❖ Pondok/Asrama	Tipe pesantren ini telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi santri yang datang daerah di luar pesantren. Metode pengajaran: <i>wetonan</i> dan <i>sorongan</i> .

<sup>33</sup>Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.1995), hlm. 257.



Tipe III: <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Masjid</li><li>❖ Rumah Kyai</li><li>❖ Pondok/Asrama</li><li>❖ Madrasah</li></ul>	Pesantren ini telah memakai sistem klasikal, santri yang tinggal dipesantren mendapat pendidikan di madrasah. Adakalanya santri madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Di samping sistem klasikal, kyai memberikan pengajian dengan sistem <i>wetonan</i> .
Tipe IV: <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Masjid</li><li>❖ Rumah Kyai</li><li>❖ Pondok/Asrama</li><li>❖ Madrasah</li><li>❖ Tempat Keterampilan</li></ul>	Dalam tipe ini di samping memiliki madrasah, juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Misalnya: peternakan, pertanian, tata busana, tata boga, toko, koperasi, dan sebagainya.

b. Tipe pesantren berdasarkan kurikulum. Berdasarkan kurikulum atau sistem pendidikan yang dipakai, pesantren mempunyai tiga tipe, yaitu:

1) Pesantren Tradisional (salāf)

Pesantren ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqah atau mangaji tudang yang dilaksanakan di masjid. Hakikat dari sistem pengajaran halaqah ini adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung kepada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu<sup>34</sup>. Artinya ilmu tidak berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan kyai. Kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh para kyai pengasuh pondok.

2) Pesantren Modern (salaf atau asli)

<sup>34</sup>Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 66





Pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar klasikal dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama tampak pada penggunaan kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses pembelajaran dan sebagai pengajar di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai kurikulum lokal.

### 3) Pesantren Komprehensif.

Tipe pesantren ini merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern<sup>35</sup>. Pendidikan diterapkan dengan pengajaran kitab kuning dengan metode sorongan, bandongan dan wetonan yang biasanya diajarkan pada malam hari sesudah salat Magrib dan sesudah salat Subuh. Proses pembelajaran sistem klasikal dilaksanakan pada pagi sampai siang hari seperti di madrasah/sekolah pada umumnya.

Ketiga tipe pesantren tersebut memberikan gambaran bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dimensi kegiatan sistem pendidikan dilaksanakan oleh pesantren bermuara pada sasaran utama yaitu perubahan baik secara individual maupun kolektif. Perubahan itu berwujud pada peningkatan persepsi terhadap agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Santri juga dibekali dengan pengalaman dan keterampilan dalam rangkameningkatkan sumber daya manusia.

Ada beberapa ciri umum dimiliki pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan masyarakat. Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima unsur yang merupakan elemen pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kyai<sup>36</sup>.

<sup>35</sup>M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001), hlm. 14.

<sup>36</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm. 44-60.



#### 4. Prospek Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren

Umat beragama dan lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa serta merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materil bangsa Indonesia. Pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan pembangunan nasional harus ditunjang dengan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan pendidikan dan pengajaran agama, warga negara akan memperoleh pendidikan moral dan budi pekerti yang akan membentuk bangsa Indonesia menjadi warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan tahu nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dengan modal jiwa yang bersih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, pembangunan nasional Indonesia dapat berjalan sukses dan lancar. Akan tetapi, pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan pembangunan nasional. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, Pancasila. Sistem ini dikenal dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua tujuan pendidikan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam ketentuan umum dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan<sup>37</sup>.

<sup>37</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Cemerlang, 2005), hlm. 102.



Sedangkan untuk kemudahan layanan pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merincikannya yang termaktub dalam Pasal 11 Ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi<sup>38</sup>.

Atas dasar inilah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dengan tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini diperjelas lagi dalam Ayat (2) pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun<sup>39</sup>.

Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

Pemerintah memiliki perhatian melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan eksistensi pesantren dalam pasal 26, sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 111.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 113.



- a. Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- b. Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- c. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan<sup>40</sup>.

Dalam ayat (3) ini memberikan pengakuan terhadap alumni pesantren untuk menjadi pendidik dalam mengajarkan ilmu agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan setelah mendapat pengakuan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan terhadap ini tentu melalui pengakuan surat bukti menamatkan pendidikan di pesantren atau ijazah/syahadah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam mengeluarkan surat edaran tentang legalisasi ijazah pesantren. Salah satu butir isi surat edaran ini adalah tentang mata pelajaran yang harus dipenuhi pesantren agar ijazah lembaga pendidikan ini diakui keabsahannya. Surat edaran ini menjadi petunjuk teknis (juknis) bagi pesantren tentang tatacara pemberian sertifikat/ijazah bagi para santri yang menamatkan pendidikannya di pesantren. Mata Pelajaran yang harus dipenuhi pesantren untuk legalisasi ijazah, yaitu tingkat Ibtidaiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Nahwu, Sharaf, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Tsanawiyah meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Nahwu, Sharaf, Tarikh, Tajwid, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Aliyah meliputi Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis,

---

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, [www.pesantren.net](http://www.pesantren.net), akses tanggal 17 Mei 2023.



Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Tauhid, Nahwu, Sharaf, Tarikh, Balaghah, serta Pelajaran pendukung lain<sup>41</sup>.

Sejak tahun 2005, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada 500 santri yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan sarja di Universitas Indonesia, Insitut Teknologi Bandung, Insitut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Insitut Teknologi Surabaya, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah<sup>42</sup>.

Pesantren juga berhasil mengembangkan perguruan tinggi. Pada tahun 2001 Pesantren Kalibeyer, Wonosobo, Jawa Tengah mendirikan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ). Pada tahun 2008 dibuka Program Pascasarjana bidang studi Pendidikan Islam dan studi Ilmu Al-Qur'an. Pada tahun 2009, mahasiswa UNSIQ mencapai lima ribu orang, dengan membina beberapa fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ekonomi, Akademi Keperawatan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam serta Program Pascasarjana<sup>43</sup>. Hal ini juga dilakukan oleh pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, seperti pesantren yang berada di bawah naungan Darud Dakwah wal-Irsyad membuka perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Terlepas dari prospek masa depan pesantren, ada beberapa masalah yang dihadapi pesantren disebabkan keterbatasan kemampuan pengelolanya. Masalah tersebut antara lain:

- a. Sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Selama ini, kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaannya tampak masih memerlukan tingkat kesadaran dalam melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai.

<sup>41</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id), akses tanggal 18 Mei 2023.

<sup>42</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm. 229.

<sup>43</sup> Zamakhsyari Dhofier, hlm. 330.



- b. Sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang manajemen kelembagaan, serta bidang- bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, harus menjadi prioritas pesantren.
- c. Manajemen kelembagaan. Manajemen merupakan unsur penting dalam pengelolaan pesantren. Pada saat ini masih terlihat bahwa pesantren dikelola secara tradisional apalagi dalam penguasaan informasi dan teknologi yang masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses pendokumentasian (data base) santri dan alumni pesantren yang masih kurang terstruktur
- d. Kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren. Tidak sedikit proses pembangunan pesantren berjalan dalam waktu lama yang hanya menunggu sumbangan atau donasi dari pihak luar, bahkan harus melakukan penggalangan dana di pinggir jalan.
- e. Kurikulum yang berorientasi life skills santri dan masyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat. Apabila melihat tantangan kedepan yang semakin berat, peningkatan kapasitas santri dan masyarakat tidak hanya cukup dalam bidangkeagamaan semata, tetapi harus ditunjang oleh kemampuan yang bersifat keahlian

Tapi dengan masalah yang dihadapi, pesantren pada umumnya dipahami sebagai lembaga pendidikan agama yang bersifat tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat melalui suatu proses sosial. Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpengaruh. Keberadaannya memberikan pengaruh dan warna keberagaman



dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, tidak hanya di wilayah administrasi pedesaan, tetapi tidak jarang melintasi daerah di mana pesantren itu berada<sup>44</sup>.

Pesantren dijadikan sebagai agen perubahan (agent of change) sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah arus modernisasi, agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan, pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya dalam kaitannya dengan perkembangan zaman untuk membekali mereka dengan keahlian melalui berbagai macam pendidikan dan keterampilan. Tujuan pendidikan pesantren adalah terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan Islam yang bersifat menyeluruh dan dilengkapi dengan kemampuan untuk mengadakan respons terhadap tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu baik di Indonesia maupun dunia abad sekarang.

#### **4. Moderasi Solusi Alternatif Mencegah Radikalisme di Indonesia**

##### **a. Nilai Nilai Islam Moderat**

Untuk mengetahui tuntunan dalam Islam berkenaan dengan keyakinan agama, keberagaman, dan keberagaman umat, bagaimana seharusnya umat Islam itu bersikap keras (radikal), longgar, ataukah tengah-tengah antara keduanya, tentu yang paling utama harus dipahami adalah bagaimana ayat al-Qur'an berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan hal tersebut, antara lain mengenai hak asasi dalam keyakinan, keberagaman (pluralitas), etika muslim dalam masyarakat plural perbedaan merupakan suatu keniscayaan, tidak ada paksaan dalam beragama, etika islam dalam masyarakat plural, kunci dasar dalam kehidupan bangsa yang plural. Pembahasan berikut membicarakan poin-poin tersebut.

##### **1) Perbedaan Merupakan Suatu Keniscayaan**

Islam diturunkan oleh Allah sebagai sistem atau pedoman yang komprehensif untuk kehidupan manusia di bumi, baik secara individu maupun kolektif, bahkan lebih dari itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adanya kelompok lain merupakan suatu fenomena sosial alami, dan itu tidak menjadi persoalan dalam Islam. Allah

<sup>44</sup> Saifuddin Amir, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. I; Bandung: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 57.



melalui al-Qur'an dan hadis sudah membuat aturan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam hubungannya dengan sesama muslim ataupun dengan pemeluk agama lain. Tujuan dari diaturnya peraturan tersebut adalah supaya keseimbangan mekanisme kehidupan akan terwujud, dan hal itu akan memudahkan manusia untuk melaksanakan tujuan utamanya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada-Nya dengan tenang melalui segala aspek kehidupan ini. "Piagam Madinah"<sup>45</sup> merupakan salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad membuat aturan yang mengikat seluruh warga yang plural saat itu, dengan visinya yang mengedepankan kebebasan, keadilan, dan kebersamaan yang harmonis antar seluruh anggota masyarakat, baik muslim ataupun non muslim

Dalam kaitannya dengan hubungan antar agama, supaya umat Islam mengetahui bagaimana aturan-aturan Allah dalam al-Qur'an yang mengatur hal itu, maka mempelajari ayat-ayat tentang tema itu tersebut menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pada bahasan berikut penulis akan menengahkan beberapa ayat yang penting untuk dipelajari berkaitan dengan masalah tersebut.

Allah berfirman dalam Surah Hud ayat 118-119:

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (118) Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan : "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semua".<sup>16</sup> (QS Hūd : 118-9)

Firman Allah di atas menyiratkan pengertian bahwa keberagaman falsafah hidup merupakan hal yang memang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya Allah kuasa untuk menjadikan manusia semuanya berada dalam satu kesatuan akidah<sup>46</sup>, tetapi itu tidak Dia lakukan. Kalimat *ءَ شَأْنًا وَلَاؤُ* mengandung arti sebaliknya, yaitu berarti Allah tidak menghendaki penyatuan umat dalam satu akidah Islam. Hal demikian senada dengan ayat Allah<sup>47</sup> *وَلَا أُوشِكُ* *الانكلا تبا كاكأا النافاها الهاد*. Ini berarti bahwa Allah tidak menuntut manusia di seluruh dunia ini hanya berada dalam satu wadah kesatuan saja.

<sup>45</sup> Teks "Piagam Madinah" bisa dilihat dalam Ibn Hishām, Al-Sīrah al-Nabawiyah, bag. 1, ed. Mustafā al-Saqā (Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1955), hlm. 501-504

<sup>46</sup> Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), juz 2, hlm. 565

<sup>47</sup> Al-Qur'ān, 32 (al-Sajdah) : 13. Lihat tafsir Maḥmūd al-Alūsī, Rūḥ al-Ma'ānī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), juz 6, hlm. 361.





Dalam upaya memahami ayat tersebut, beberapa ulama tafsir menyatakan bahwa keberagaman itu merupakan suatu alasan penciptaan. Ayat di atas yang berbunyi *ولذلك خلقناهم*, ditafsiri oleh al-Ḥasan al-Baṣri (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Kathīr) dengan *وللإختلاف أفعالهم*.<sup>48</sup> Manusia diberikan keleluasaan untuk menentukan jalan yang dipilihnya (antara jalan fujūr dan taqwā)<sup>49</sup> sebagai ujian bagi mereka. Ayat-ayat Allah dan semua kenyataan di atas menunjukkan bahwa pluralitas kepercayaan merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri. Hal demikian mengandung pengakuan akan eksistensi akidah yang berbeda dan beragam dengan segala karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-lain-an pihak lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan<sup>50</sup>.

### 1) Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama

Tak ada satupun orang yang bisa memaksa hati seseorang untuk meyakini hal tertentu. Mulut dapat berkata “ya” ketika mendapatkan tekanan, namun tidak dengan hati. Dalam hal pilihan pribadi perihal keyakinan agama, Allah berfirman dalam sūrah Yūnus : 99 :

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?” (QS Yūnus : 99)

Ayat di atas juga didukung oleh ayat lain di sūrah al-Baqarah 256 :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada ṭāghūt, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS al-Baqarah : 256)

Statement Allah di atas merupakan ungkapan yang sangat tegas berkenaan dengan pandangan Islam terhadap perbedaan agama dan kebebasan manusia untuk memilih apa yang diyakininya. Sayid Quṭb

<sup>48</sup> Ibnu Kathīr, Tafsīr..., 565. Lihat juga al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Araby li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 1967), juz 9, hlm. 114-5.

<sup>49</sup> Al-Qur'ān, 91 (al-Shams) : 8

<sup>50</sup> Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 207



mengatakan bahwa kebebasan itu merupakan hak asasi manusia yang paling utama, yang tanpa itu manusia bukanlah manusia.<sup>22</sup> Perbedaan agama itu karena semata-mata pilihan pribadi, yang diambil berdasarkan keyakinan pribadi. Tidak ada satupun orang yang boleh dan bisa memaksa seseorang untuk menganut kepercayaannya. Secara zahir mungkin paksaan itu bisa terjadi, tetapi kepercayaan itu urusan hati, dan hati itu tidak bisa berbohong.

## 2) Kunci Dasar Dalam Kehidupan Bangsa Yang Plural

Allah menyatakan dalam al-Qur'an sūrah al-Baqarah ayat 143 bahwa umat Muhammad ini dijadikan sebagai umat yang "wasatān"

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang adil, agar kamu menjadi saksi (perbuatan) manusia, dan agar Rasūl (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu..." (Al-Baqarah: 143)

Kalimat "wasat" dalam bahasa Arab memiliki makna yang berkisar antara adil, baik, tengah, dan seimbang<sup>51</sup>. Wasat dari segala sesuatu adalah bagian yang ada di antara kedua ujungnya<sup>52</sup>. Dalam peribahasa Arab dikenal ungkapan (sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya). Lawan kata dari "wasat" adalah "ghuluww" yang berarti berlebihan. Allah berfirman:

"Katakanlah: "Hai Ahli Kitāb, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dalam agamamu dengan cara yang tidak benar..." (Al-Māidah: 77).

Kata "wasat" di Indonesia sering diartikan dengan "sikap moderat". Sementara "ghuluww" diungkapkan untuk sikap "ekstrim". Seseorang yang bersikap wasat akan selalu menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan yang berbeda. Sementara orang yang bersikap ekstrim akan bersikap sebaliknya, ditandai dengan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap pandangan tertentu dan menganggap pandangan lain sebagai sesat, merasa paling baik dan benar, dan bahkan terkadang tega mengkafirkan pihak lain tersebut. Prinsip inilah yang bisa ditangkap dari pesan ayat-ayat al-Qur'an di atas. Toleransi merupakan salah satu bagian terpenting dalam bangunan agama. Al-Qardāwī, dalam kitabnya menyebutkan empat

<sup>51</sup> Aḥmad bin Fāris, Mu'jam Maqayīs al-Lughah (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 522.

<sup>52</sup> Ibn Manẓūr, Lisān al-'Arab (t.tp.: Dār al-Ma'ārif. t.th), Juz 7, hlm. 424.



faktor utama umat Islam selalu bersikap toleran terhadap kelompok non muslim<sup>53</sup>, yaitu:

- Keyakinan akan kemulyaan manusia bagaimanapun keadaannya<sup>54</sup>
- Keyakinan bahwa perbedaan dalam agama dan keyakinan merupakan hal yang memang dikehendaki oleh Allah yang telah memberi manusia ujian untuk memilih antara jalan kesesatan (kufur) dan keselamatan (iman).<sup>55</sup>
- Orang muslim tidak berhak mengadili ke-kufur-an kelompok lain. Allah-lah yang akan melakukan hal itu nanti di akhirat.<sup>56</sup>
- Keyakinan bahwa Islam mengajarkan berbuat adil dan akhlak mulia, sekalipun kepada kelompok lain yang berseberangan keyakinan.<sup>57</sup>

## 5. Menumbuhkan Moderasi Beragama di Pendidikan Pesantren

Radikalisme adalah suatu ideologi yang bertujuan mengubah suatu keadaan secara cepat dengan kemauannya sendiri, oleh karenanya diperlukan filter utamanya dari pendidikan pesantren yang kental dengan pendidikan Islam. Peran pondok pesantren dalam menumbuhkan nilai nilai moderasi beragama sangat dibutuhkan. Pesantren memiliki banyak potensi yang dapat mendukung mewujudkan moderatisme dalam beragama dimulai dari kalangan santri sampai masyarakat luas.

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia, karena itu ia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensinya demi peningkatan harkat dan martabat bangsa menuju tercapainya kemanusiaan yang utuh sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan perjuangan ke arah tersebut di atas, harus senantiasa berupaya meningkatkan peranannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, agar keberadaannya betul-betul berdaya guna untuk mencetak lulusan yang berkarakter dan mencintai

<sup>53</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, Ghayr al-Muslimīn fi al-Mujtama' al-Islāmī (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. ke-3, 1993), hlm. 53-55

<sup>54</sup> Al-Qur'ān, 17 (al-Isrā') : 70

<sup>55</sup> Al-Qur'ān, 11 (Hūd) : 118 dan 18 (al-Kahfi) : 29

<sup>56</sup> Al-Qur'ān, 22 (al-Ḥajj): 68-69 dan al-Shūrā: 15

<sup>57</sup> al-Qur'ān sūrah al-Shūrā : 15, al-Mā'idah : 8, dan al-Mumtaḥanah : 8



bangsa dan Negara. beberapa peran yang dapat dilakukan pesantren dalam menumbuhkan moderasi beragama, yakni:

### 1) Pondok Pesantren Sebagai *Conservator*

Peran pondok pesantren dalam membangun moderasi beragama di Indonesia tidak hanya dibatasi dengan pembelajaran atau kajian, tetapi juga harus berperan aktif di luar, bahkan di luar jam Proses Belajar Mengajar. Peran tersebut dapat berupa motivator, fasilitator, konselor bahkan menjadi contoh atau figur yang kemudian menimbulkan proses imitasi dari guru/kyai kepada santri.

Peran dasar seorang guru/kyai di pondok pesantren adalah menjadi seorang *conservator*, mengingat bahwa moderasi beragama merupakan hal baru untuk didengarkan masyarakat. Pondok pesantren (Kyai/Gus) dituntut harus mampu memahami terlebih dahulu, bagaimana moderasi beragama. Moderasi beragama dalam aspek ibadah ini tidak mencampur adukan pemahaman dari setiap agama, tetapi tetap berpegang teguh dengan keyakinan agama yang dimiliki masing-masing, serta moderasi beragama memungkinkan untuk meningkatkan kualitas beribadah seseorang.

Secara singkat pondok pesantren sebagai *conservator* memiliki tanggung jawab besar kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya dan menuntut untuk selalu mengingatkan kepada santri dalam mengenal dan mengimplementasikan moderasi beragama sebagai modal dalam menjalani kehidupan yang beragam.

### 2) Pondok Pesantren Sebagai *Inovator*

Pondok Pesantren seyogyanya memiliki peran sebagai *inovator* yaitu mampu memberi inovasi dalam membangun moderasi beragama. Inovasi seorang kyai/gus di Pondok Pesantren tidak luput dari perannya sebagai sentral dalam pembinaan kepribadian terutama karakter dalam membangun moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama dalam pembinaan karakter bisa dilakukan dalam penguatan spiritual maupun nasionalisme yang terintegrasi dalam penguatan karakter yakni; (1) penguatan cara pandang, (2) cara bersikap, (3) praktik beragama jalan tengah (4) Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen calon guru.

### 3) Peran Pondok Pesantren Sebagai *Transmitter*



Peran Pondok Pesantren sebagai transmiter dalam membangun moderasi beragama di Indonesia adalah meneruskan paham moderasi beragama. Meneruskan paham tentang moderasi beragama dilakukan kyai/gus dengan salah satu cara yaitu memotivasi, atau menjadi motivator kepada santri-santri di pondok pesantren secara aktif dan berkelanjutan.

### **3) Peran Kyai Sebagai Transformator**

Program yang diinovasikan selain berbentuk kegiatan, juga terkadang ada suatu program yang tidak terencana dan tidak berbentuk kegiatan, yang mana menjadi suatu peran Kyai/Gus yaitu transformator melalui memotivasi dan menjadi figur. Memotivasi dan menjadi figur merupakan program diri sendiri yang menjadi beban moral seorang tokoh agama, agar mampu menimbulkan proses imitasi positif kepada para santri di pondok pesantren. Transformasi yang dilakukan Kyai/Gus dalam membangun moderasi beragama yaitu, menjadi seorang figur (contoh/panutan). Memotivasi dan memberi bimbingan sebagai usaha meneruskan sistem nilai, sebagai peran juga tidak lepas dari bagaimana sikap Kyai/Gus memberi contoh dan menjadi figur untuk setiap santrinya.

### **4) Peran Kyai/Gus Sebagai Organizer**

Inovasi dalam membangun memerlukan pengorganisasian yang mampu memberikan dampak kepada santri baik lingkungan pondok pesantren, maka dari itu salah satu peran Kyai adalah sebagai organizer. Organizer (penyelenggara) untuk aktifitas dalam membangun moderasi beragama di pondok pesantren, hal ini dianggap sangat penting untuk tercapainya tujuan dari membangun moderasi beragama di pondok pesantren.

Melalui pendekatan pendidikan (*Educative Approach*), Pondok Pesantren selalu berusaha mengembangkan konsep dasarnya dan semakin meningkatkan peran serta civitas lembaganya menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional, baik pembangunan seutuhnya sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, maupun sektor pembangunan lainnya, material maupun keagamaan. Peran Pondok Pesantren seperti yang digambarkan tentu perlu diwujudkan dengan kesiapan para pengasuh dan pembina serta tenaga-tenaga yang terkait lainnya untuk mengadakan pembaharuan sistem-sistem yang ada, termasuk sistem kelembagaan dan menajemennya sebagai konsekwensi dari keinginan akan adanya kemajuan sesuai dengan panggilan zaman. Maka di samping mempertahankan tradisionalitas yang masih sangat berguna, penting sekali memodernisir



beberapa sub sistem yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Secara normatif, pesantren berkaitan dengan ajaran agama (Islam) yang dikonsepsi dalam bentuk sistem pendidikan. Karakteristik pendidikan pesantren memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan pada umumnya, keunikannya tersebut terdapat pada potensi lokal yang dimiliki pesantren seperti *ngaji kitab kuning* secara intens yang dibarengi dengan pemahaman *kitab putih* secara mendalam dan sistematis, santri yang belajar Islam di pesantren secara sanad keilmuan dinilai jelas, secara pemahaman dan keilmuan bersambung kepada Rasulullah saw. Selain itu, sistem pendidikan disiplin yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan tradisi lokal pesantren tentunya akan memberikan hasil yang luar biasa yakni menghasilkan sumber daya manusia yang jujur, ikhlas, cerdas, dan matang pemahaman keagamaan. Hal demikian, dibutuhkan oleh Negara guna menghadapi krisis kemanusiaan dan keagamaan yang sedang terjadi saat ini.

Figur kyai di pondok pesantren juga menjadi penting untuk dijadikan sebagai agen perdamaian, kyai yang notabene bertugas mengajar agama dan memberikan terobosan pengembangan pesantren dapat dioptimalkan untuk memberikan paham moderatisme Islam kepada semua santri dan wali santri. Langkah tersebut dapat dilakukan oleh kyai karena selain menjadi publik figur yang dipercaya masyarakat juga akan sangat mungkin didorong untuk mencetak santri yang mencintai tanah air, bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sangat dibutuhkan dan dapat diimplementasikan moderasi beragama dalam berbagai bentuk yakni; (1) kesesuaian prinsip moderasi beragama dengan kurikulum pendidikan, (2) merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi dalam setiap pelajaran, (3) penyusunan perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi.

## KESIMPULAN

Pesantren dan deradikalisasi merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia berkaitan erat dengan pengajaran agama.

Pesantren yang dikenal sekarang berasal dari Jawa, walaupun pada abad ke-7 M. telah diketahui terdapat komunitas muslim di Indonesia, namun lembaga



pendidikan pada masa itu dikenal nama meunasah. Pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, kiyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaanya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri.

Perkembangan pesantren dari masa ke masa tetap mengalami perkembangan yang signifikan, walaupun pada masa penjajahan Belanda, lembaga pendidikan Islam mengalami penurunan kuantitas karena tindakan diskriminatif penjajah Belanda. Namun, pesantren tetap eksis karena kemampuan pengelola pesantren menyiasati segala kebijakan penguasa dari masa ke masa. Pada tahun 2001, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren setelah menyadari perkembangan pesantren yang pesat.

Berdasarkan fungsinya sebagai pendidikan agama Islam, pesantren menjadi tempat penting penyebaran nilai-nilai keagamaan baik inklusif maupun eksklusif. Akan tetapi, pesantren diharapkan peranannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dapat melahirkan santri yang moderat, toleran. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan agama yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama.

## REFRENSI

- Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: KIS, 2001.
- Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Islam IV*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2002.
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Akbar S. Ahmed, *Islam sebagai Tertuduh*, Bandung: Arasy Mizan, 2004.
- Agus SB, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014).
- Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Araby li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 1967.



Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqayīs al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Agil asshofie, *Radikalisme Gerakan Islam*, <http://agilasshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html>, diakses pada 19 Mei 2024.

Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Kehidupan Jawa*, Jakarta: PT. Grasindo Utama, 2001.

Fatah Syukur, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* t.tp.: Dār al-Ma'ārif. t.th

Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Jajat Burhanuddin, *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002. Roxanne L. Euben, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Jakarta: Serambi, 2002.

M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, Jakarta: PSAP, 2005.

Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, Yogyakarta: Terawang Press, 2003.

Mustofa, I., & Raikhan, R. (2023). *Pembinaan Madrasah Jalur Formal Di Pesantren (Telaah Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019)*. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 30-39. <https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1639>

Mustofa, *Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Press, 1997

Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.

Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010.





- M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Cemerlang, 2005.
- Prayogo, T. I., Nisrina Rifdah, Amelda Dahni, Mahayu Fanieda, Zatul Faidah, & Malika Fildzah Nur Shabrina. (2023). *Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pengembangan Sains dan Teknologi (Studi Kasus Unida Gontor)*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 10(2), 239-254.  
<https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1882>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, [www.pesantren.net](http://www.pesantren.net)., akses tanggal 17 Mei 2024.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)., akses tanggal 18 Mei 2023.
- Saifuddin Amir, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2006.
- Tempo.com dari, <https://nasional.tempo.com> —Jokowi usul ganti istilah radikalisme jadi manipulator-agama Diakses pada tanggal 19 Mei 2023
- Teks “Piagam Madinah” bisa dilihat dalam Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, bag. 1, ed. Mustafā al-Saqā, Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1955.
- Tafsir Maḥmūd al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma’ānī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994
- Tim Penyusun, *Modul Pengembangan Wadah Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2016
- Wawan H. Purwanto, *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-aakarnya, Mungkinkah?*, Jakarta: CMB Press, 2007.
- Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ghayr al-Muslimīn fi al-Mujtama' al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993
- Youssef M. Choueiri, *Islam Garis Keras: Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, Yogyakarta: Prisma Media Qonun, 2003.



---

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, Jakarta:LP3ES, 1997.

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zuhairini, et al., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.